**PENGARUH DUALISME KEDUDUKAN DAN WEWENANG KECAMATAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KABUPATEN DALAM PRESPEKTIF OTONOMI DAERAH DI INDONESIA**

***THE EFFECT DUALISM POSITION AND AUTHORITY TO IMPLEMENTATION OF AFFAIRS GOVERNMENT THE DISTRICTS AREA IN THE PRESPECTIVE OF REGIONAL AUTONOMY INDONESIA***

**JURNAL ILMU HUKUM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Pasundan

Oleh :

**Nama : TATA KURNIA**

**NPM : 139030018**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2019**

**ABSTRAK**

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah menyangkut kelembagaan kecamatan baik kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, maupun sumber daya manusia dan sumber pembiayaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep yang tepat tentang kedudukan dan wewenang Kecamatan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten dalam prespektif otonomi daerah, adalah Kecamatan lebih cenderung sebagai perangkat daerah kabupaten dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya penguatan kelembagaan kecamatan, baik penambahan pelimpahan wewenang sesuai dengan fungsi utama pemerintah yaitu pelayanan, pengaturan dalam bentuk regulasi untuk mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, juga dukungan sumber daya kecamatan baik dukungan personil, sarana prasarana, maupun anggaran kecamatan yang memadai, sehingga kedudukan dan wewenang Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat atributif, maupun urusan pemerintahan yang bersifat delegatif serta urusan pemerintahan lainnya yang ditugaskan kepada Camat di daerah Kabupaten dapat sesuai dengan asas otonomi daerah.

***ABSTRACT***

*The granting of the widest possible autonomy to the Regions is directed to accelerate the realization of people's welfare through service improvement, empowerment and community participation. Through Law Number 23 Year 2014, as amended by Law Number 9 Year 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 Year 2014 concerning this Regional Government, regional governments and communities in the regions are more empowered and at the same time given more responsibilities great to accelerate the pace of regional development. In line with this, the implementation of regional autonomy policy has led to changes, both structurally, functionally and culturally in the arrangement of regional governance. One very important change is related to sub-district institutions both position, task and function, organization, as well as human resources and funding sources. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. So the research was conducted through two stages, namely literature study and field research which were only supporting, the analysis of the data used was qualitative juridical analysis, namely the data obtained, both in the form of secondary data and primary data were analyzed without using statistical formulations. The results showed that the proper concept of the position and authority of the District in the administration of government affairs in the Regency in the perspective of regional autonomy, is that the District is more likely to be a district apparatus within the framework of the principle of decentralization. As a leading regional apparatus in providing services to the community, it is necessary to strengthen sub-district institutions, both to increase the delegation of authority in accordance with the main functions of the government, namely service, regulation in the form of regulations to support performance in carrying out tasks and functions, as well as sub-district resources support both personnel support , infrastructure, as well as adequate district budgets, so that the position and authority of the Sub-district in carrying out attributive government affairs, as well as delegative government affairs and other government affairs assigned to the Camat in the Regency area can be in accordance with the principle of regional autonomy.*

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Sumber Buku**

A.F. Leemans, *Changing Patterns of Local Governemnt*, IULA, The Hague, Netherlands, 1970.

Alderfer Harold F, *Local Government in Developing Countries*, McGraw-Hill Series in International Development, 1964.

Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia Pustakan Utama, Jakarta 1995.

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah,* Alumni, Bandung, Tanpa Tahun.

Ateng Syfrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya,* Mandar Maju, Jakarta, Tanpa Tahun.

Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945,* IKIP Semarang Press, Semarang,1990.

Bayu Suryaningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, IIP, Jakarta, 1979.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia, Suatu Analisa*, Dewaruci Press, Jakarta, 1980.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Bayu, Jakarta 1981.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pemerintahan Administrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH-UII, Yogyakarta, 2001.

Bhenyamin Hoessein, *Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Konteks Pemerintahan Umum*, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia,* Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta, 2009.

Dennis A Rondinelli dan G. Shabir Cheema: *Decentralization and* Development*, Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications, London, 1983.

Dicey, Albert Van, *Introduction to The Study Of The Law Of The Constitution*, 8th Edition, Memillan, Library of Congress Cataloging in Publication Data, London, 1915.

Dadang Juliantara (ed), *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, 2005.

Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung, 1974.

Fjeldstad Odd-Helge, *Decentralization and Corruption*, *A Review Of The Literature,* Utstein Anti-Corruption Resource Centre, 2003.

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Guido Bertucci, Riccardo Nencini, and Enrico Cecchetti; *Decentralized Governance for Democracy, Peace, Development and Effective Service Delivery,* Region of Tuscany Regional Assembly, Italian Presidency, and United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2004.

Gaffar Karim*, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

HAW. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2004.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,* Grasindo, Jakarta, 2007.

H. M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013.

Hambali, *Ilmu Administrasi Birokrasi Publik,* Yayasan Kodama, Yogyakarta, 2015.

Kansil C.S.T., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Kalsen Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahankan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2014.

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,* Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1996.

Jean-Benoît Albertini, *La Déconcentration: l‟administration territoriale dans la reforme de l‟État*, Economica, Paris, 1997.

J. S. Badudu dan Moh. Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen Ars Aeguilibri, 1998.

John M Cohen., dan Stephen B. Peterson, *Administrative Decentralization, Strategies for Developing Countries,* Kumarian Pers, Connecticut, USA, 1999.

Joko Widodo, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah,* Insan Cendekia, Surabaya, 2001.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009.

Keith Dowding, *The Civil Service*, Routledge Publisher, New York, N.Y, 1995.

Koesoemahatmadja dalam E. Koswara, *Otonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat,* Widya Praja HP, Jakarta, 1999.

M. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1951.

Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1998.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-2 Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah,* INSIST Press, Yogyakarta, 2000.

Nur Basuki minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010.

Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Tehadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Daerah Otonomi Khusus,* Bandung, Nusa Media, 2014.

Oentarto, I Made Suwandi, dan Dodi Riyadmadji *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*, Samitra Media Utama, Jakarta, 2004.

Phillip Mawhood, *Decentralization: The Concept and The Practice, Local Government in The Third World, The Experience of Tropical Africa*, edited by Philip Mawhood, John Wiley and Sons, 1983.

Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994.

R. Joeniarto, *Perkembangan Pemerintah Lokal,* Alumni, Bandung, 1979.

Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Rasyid Ryaas, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,* BPFE, Yogyakarta. 2002.

Smith B.C., *Decentralization, The Territorial Dimension of The State*, George Allen & Unwin, London, 1985.

Soejito Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,* Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Sabine George, *A History of Political Theory*, George G. Harrap & CO. Ltd., London, 1995.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukkum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.

Strong C.F, *Modern Political Constitusions: an Introductions to the Comparative Study of Their History and Existing,* The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1996.

S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia,* Liberty, Yogyakarta, 1997.

Slamet Effendy Yusuf & Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia*, PIS, Jakarta 2000.

Sadu Wasistiono, *Esensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,* Alqaprint, Bandung, 2001.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*, Fokusmedia, Bandung, 2009.

Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Arus Balik Kekuasaan Pusat*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2002.

Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar - Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan, Jakarta, 2002.

Soehino, *Ilmu Negara*, Ed. 3, Cet. 3, Liberty, Yogyakarta, 2000.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Ilmu Negara,* Cet. 4 Liberti, Yogyakarta, 2004.

Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara,* Rajawali Press Jakarta, Tanpa Tahun.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Bentuk Negara dan Implementasinya Berdasarkan UUD 1945*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tanpa Tahun.

Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

Sumaryadi, I Nyoman, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah,* Citra Utama, Jakarta, 2005.

Suriansyah Murhani, *Kewenangan Pemerintah Dalam Mengurus Bidang Pertanahan,* Laksbang Justitia, Surabaya, 2009.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid 1, 2, 3, Liberty, Yogyakarta, 1994.

Visser’thooft H. Ph., *Filsafat Ilmu Hukum*, terjemahan Arief Sidharta, Martinus Nijhoff, The Hague, 1988.

Van Der Pot C.W., dikutip oleh Martin H. Hutabarat dkk. (penyunting), *Hukum dan Politik Indonesia Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Y.W Sunindia dan Ninik Widayanti, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah,* Bina Aksara, Jakarta, 1987.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-4;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa;

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah;

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;

**C. Sumber Lain**

Andi Pitono, *Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,* Jurnal Kebijakan Publik Volume 3, Nomor 1, Maret 2012, Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Jatinangor.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab,* Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH-UII, Yogyakarta, 2001.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Pada Seminar Nasional. FH Unpad, Bandung 13 Mei.

Bagus Krisna Dwipayana, *Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,* Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Bhenyamin Hoessein, *Kebijakan Desentralisasi*, Jurnal Administrasi Negara Vol. II. No.02. Maret, 2002.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, et al, *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, PKPADK FISIP Universitas Indonesia, Depok, 2005.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II*“, *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi”*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2009.

Diana Conyers, *Decentralization and Development: a Review of the Literature, dalam Public Administration and Development,* Vol. 4, 1984.

Edy Sutrisno, *Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia,* Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2015.

Gunawan, *Peran Dan Fungsi Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Semarang Dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah,* Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri 12 Desember 2014.

Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.

Hernadi Affandi, *Tarik Ulur Desentralisasi vs Sentralisasi*, Artikel Pikiran Rakyat Cyber Media, yang diterbitkan pada Senin, 03 Januari 2005.

Jimly Asshiddiqie, *Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah*, Makalah yang dimuat dalam www.legalitas.org, Sabtu, 21 April 07.

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH UI,1983.

Moh. Iskandar Mardani, *Pelimpahan Kewenangan Bupati Dalam Otonomi Daerah (Kajian Pelimpahan Kewenangan Delegatif Bupati Kepada Camat di Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah),* Jurnal Academica Fisip Untad Vol.03 No. 01 Februari 2011.

Ni’matul Huda, *Berkayuh Diantara Bentuk Negara Kesatuan Dan Federal,* Jurnal Konstitusi PSHK UII, Vol.1.No.01.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.

R.M.A.B. Kusuma, *Negara Kesejahteraan Dan jaminan Sosial*, Jurnal Konstitusi, volume 3, Nomor 1, Pebruari 2006.

RA. Kinseng, *Struktugensi: Sebuah Teori Tindakan*, Program Studi Sosiologi Pedesaan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Pasca Sarjana IPB,Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Agustus 2017.

Rozan Anwar, *Pengembangan Model Administrasi Publik,* Fisip UI, 2009.

Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1998.

Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara,* Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005.

Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990.

Syarif Hidayat: *Mengurai Peristiwa Meretas Karsa, Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi: *Otonomi Daerah Untuk Siapa*, Vol. 29, LP3ES, Juli 2010.

Y. Andi Surya Putra, *Peranan Camat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen (Studi Otonomi Daerah Di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen),* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011.

Yudianto, *Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa),* Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin, Makassar, 2016.

Zayanti Mandasari, *Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi*, Tesis Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2015.